

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Auditing dan Standar Auditing

2.1.2 Pengertian Auditing

Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi. Atestasi mempunyai pengertian umum yaitu suatu komunikasi dari seorang *expert* mengenai kesimpulan tentang reabilitas dari pernyataan seseorang. Dalam pengertian yang sempit, atestasi merupakan komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai realibilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggungjawab dari pihak lainnya.

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen, pada akhir pemeriksaan akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan auditing, berikut ini adalah pengertian auditing antara lain:

Menurut Arens (2011:4):

Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kinerja yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten, orang yang independen.

Menurut Agoes (2012:4):

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Mulyadi (2009:9):

Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditing adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen atas laporan keuangan beserta catatan-catatan akuntansi perusahaan dan bukti-bukti pendukung lainnya kemudian, memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan.

2.1.2 Standar Auditing

Menurut PSA.01 (SA Seksi 150) dalam Agoes (2012:30):

Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu “prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) dalam Agoes (2012:31) adalah sebagai berikut:

- a. Standar Umum
 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
- b. Standar Pekerjaan Lapangan
 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan staf, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
- c. Standar Lapangan
 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan, audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.2 Jenis-Jenis Audit dan Tujuan Audit

2.2.1 Jenis-Jenis Audit

Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh auditor. Jenis-jenis tersebut dapat didasarkan pada luasnya pemeriksaan ataupun jenis pemeriksaan. Menurut Agoes (2012:10) jenis audit berdasarkan luasnya pemeriksaan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) yang independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Pengendalian Mutu.
2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)
Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilaksanakan juga terbatas.

Sedangkan ditinjau dari jenis pemeriksaan, menurut Mulyadi (2009:30) audit dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)
Adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit, laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur, dan Kantor Pelayanan Pajak.

2. **Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)**
Adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria.
3. **Audit Operasional (*Operational Audit*)**
Merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

2.2.2 Tujuan Audit

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat kita ketahui bahwa tujuan auditing pada umumnya untuk menentukan apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak manajemen telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Institusi Akuntan Publik Indonesia (2011:110:1) dalam Prasanti (2013:10) tujuan auditing adalah:

“Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak memungkinkan dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat.”

Untuk mengetahui tujuan audit, auditor harus mengevaluasi masing-masing lima asersi laporan yang berkaitan dengan saldo akun tertentu atau kelompok transaksi tertentu. Karena hubungan tujuan audit dengan asersi tersebut sangat erat, maka auditor seringkali menggunakan istilah tersebut secara bergantian. Pengklasifikasian asersi tersebut menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:326.2) dalam Prasanti (2013:10) adalah:

1. Keberadaan atau Keterjadian (*Existence or Accurrence*)
Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu.
2. Kelengkapan (*Completeness*)
Asersi tentang kelengkapan hubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan didalamnya.
3. Hak dan Kewajiban (*Right and Obligation*)
Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.
4. Penyajian dan Pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)
Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan semestinya.

2.3 Pengertian dan Tujuan Struktur Pengendalian Intern

2.3.1 Pengertian Struktur Pengendalian Intern

Struktur Pengendalian intern merupakan suatu bagian terpenting dalam suatu perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan tersebut. Struktur pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai berikut ini:

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2006:319.2) adalah:

Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 (tiga) golongan tujuan berikut ini:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa struktur pengendalian intern merupakan suatu proses yang dirancang dan dijalankan untuk membantu pihak manajemen dalam mengendalikan semua kegiatan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan dan penyimpangan serta mendorong untuk dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan.

2.3.2 Tujuan Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern dibuat untuk menjamin tercapainya tujuan yang direncanakan perusahaan. Struktur pengendalian intern memberikan pengawasan

dalam semua kegiatan perusahaan. Tanggungjawab auditor atas struktur pengendalian intern adalah harus memahami hubungan antara pengevaluasian struktur pengendalian intern dengan tujuan audit.

Tujuan struktur pengendalian intern menurut Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2006:319.2) terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: “Keandalan pelaporan keuangan, Efektivitas dan efisiensi operasi, Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Menurut Arens (2011:316) tujuan struktur pengendalian intern adalah:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan bagi para investor, kreditor, dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk menyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan seperti misalnya GAAP. Tujuan pengendalian yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini.
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi
Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan. sebuah tujuan penting atas pengendalian tersebut adalah akurasi informasi keuangan dan nonkeuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan.
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
Perusahaan publik, perusahaan nonpublik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedang yang erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Dari pengertian tujuan struktur pengendalian intern diatas dapat disimpulkan bahwa struktur pengendalian intern yang paling penting adalah melindungi harta kekayaan perusahaan, keandalan laporan keuangan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

2.4 Unsur-Unsur Struktur Pengendalian Intern

Struktur Pengendalian intern terdiri atas lima komponen yang saling berkaitan. Lima komponen tersebut disebut dengan unsur-unsur struktur pengendalian intern. Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia dalam SPAP (2006:319.2) unsur-unsur struktur pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Integritas dan nilai etika
Merupakan unsur pokok lingkungan pengendalian yang mempengaruhi pendesaian pengurusan, dan pemantauan komponen yang lain. Integritas dan perilaku etika merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas, bagaimana hal itu dikomunikasikan, dan ditegakkan dalam praktik. Standar tersebut mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin menyebabkan personel melakukan tindakan tidak jujur, melanggar hukum, atau melanggar etika. Standar tersebut juga mencakup komunikasi dan kode etik serta dengan contoh nyata.
- b. Komitmen terhadap kompetensi
Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan dibebankan kepada individu. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan kedalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan.
- c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
Atribut yang berkaitan dengan dewan komisaris atau komite audit ini mencakup independensi dewan komisaris atau komite audit dari manajemen, pengalaman dan tingginya pengetahuan anggotanya, luasnya keterlibatan dan kegiatan pengawasan, memadainya tindakan, tingkat sulitnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan atau komite tersebut kepada manajemen, dan interaksi dewan atau komite tersebut dengan auditor intern dan ekstern.
- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen
Karakteristik ini meliputi antara lain pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau risiko usaha; sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dan upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya.

- e. Struktur organisasi
Struktur organisasi suatu entitas memberikan rerangka kerja menyeluruh bagi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasi. Suatu struktur organisasi meliputi pertimbangan bentuk dan sifat unit-unit organisasi entitas, termasuk organisasi pengolahan data serta hubungan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan. Selain itu, struktur organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggungjawab dalam entitas dengan cara yang semestinya.
- f. Pemberian wewenang dan tanggungjawab
Metode penetapan wewenang dan tanggungjawab meliputi pertimbangan atas:
 1. Kebijakan entitas mengenai masalah seperti praktik usaha yang dapat diterima, konflik kepentingan dan aturan perilaku.
 2. Penetapan tanggungjawab dan delegasi wewenang untuk menangani masalah seperti maksud dan tujuan organisasi, fungsi operasi dan persyaratan instansi yang berwenang.
 3. Uraian tugas pegawai yang menegaskan tugas-tugas spesifik, hubungan pelaporan dan kendala.
 4. Dokumentasi sistem komputer yang menunjukkan prosedur untuk persetujuan transaksi dan pengesahan perubahan sistem.
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pemekerjaan, orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi dan pemberian kompensasi dan tindakan perbaikan.

2. Penilaian Risiko

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini:

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi
Perubahan dalam lingkungan peraturan dan operasi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan.
- b. Personel baru
Personel baru mungkin fokus yang berbeda atas atau pemahaman terhadap pengendalian intern.
- c. Sistem informasi baru atau yang diperbaiki
Perubahan signifikan dan cepat dalam sistem informasi dapat mengubah risiko berkaitan dengan pengendalian intern.
- d. Pertumbuhan yang pesat
Perluasan operasi yang signifikan dan cepat dapat memberikan tekanan terhadap pengendalian dan meningkatkan risiko kegagalan dalam pengendalian.

- e. Teknologi baru
Pemasangan teknologi baru kedalam operasi atau sistem informasi dapat mengubah risiko yang berhubungan dengan pengendalian intern.
- f. Lini produk, produk atau aktivitas baru
Dengan masuk kebidang bisnis atau transaksi yang didalamnya entitas belum memiliki pengalaman dapat mendatangkan risiko baru yang berkaitan dengan pengendalian intern.
- g. Restrukturisasi korporasi
Restrukturisasi dapat disertai dengan pengurangan staf dan perubahan dalam supervisi dan pemisahan tugas yang dapat mengubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian intern.
- h. Operasi luar negeri
Perluasan atau perolehan operasi luar negeri membawa risiko baru atau seringkali risiko yang unit yang dapat berdampak terhadap pengendalian intern, seperti risiko tambahan atau risiko yang berubah dari transaksi mata uang asing.
- i. Penerbitan standar akuntansi baru
Pemakaian prinsip akuntansi baru atau perubahan prinsip akuntansi dapat berdampak terhadap risiko dalam penyusunan laporan keuangan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktifitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya, aktifitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini:

- a. Review kinerja
Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya; menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan, dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas.
- b. Pengolahan informasi
Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerolehan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk mainframe, minicomputer, dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual. Pengendalian ini

membantu menetapkan bahan transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

c. Pengendalian fisik

Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aset, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aset dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan file data, dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengendalian.

d. Pemisahan tugas

Pembebanan tanggungjawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aset ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (termasuk peristiwa dan keadaan) dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aset, utang, ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem berdampak kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan semestinya dalam mengelola dan mengendalikan aktivitas entitas dan untuk menyusun laporan keuangan yang andal.

Sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah.
- b. Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan penggolongan semestinya transaksi untuk pelaporan keuangan.
- c. Mengukur nilai transaksi dengan cara sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencatatan nilai moneter semestinya dalam laporan keuangan.
- d. Menentukan periode waktu terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi semestinya.
- e. Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang berkaitan dalam laporan keuangan.

Komunikasi mencakup pemberian pemahaman atas peran dan tanggung jawab individual berkenaan dengan pengendalian intern atas laporan keuangan. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman personel tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain dan cara pelaporan penyimpangan kepada tingkat yang semestinya dalam entitas. Pembukaan saluran komunikasi membantu memastikan bahwa penyimpangan dilaporkan dan ditindaklanjuti.

Komunikasi dapat mengambil berbagai bentuk seperti panduan kebijakan, akuntansi, dan panduan pelaporan keuangan, serta memorandum. Komunikasi juga dapat dilakukan secara lisan dan melalui tindakan manajemen.

5. Pemantauan

Adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pengendalian mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau suatu kombinasi diantara keduanya.

Pemantauan secara terus menerus terhadap aktivitas dibangun ke dalam aktivitas normal entitas yang terjadi secara berulang dan meliputi aktivitas pengelolaan dan supervisi yang reguler.

Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dari pihak luar.

2.5 Hubungan Struktur Pengendalian Intern dengan Ruang Lingkup (Scope) Pemeriksaan

Jika struktur pengendalian intern suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan maupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar, dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataannya, jika auditor tersebut kurang berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya.

Untuk mencegah kemungkinan tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas struktur pengendalian intern perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa struktur pengendalian intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas *scope* pemeriksannya pada waktu melakukan *substantive test*.

2.6 Pemahaman dan Evaluasi atas Struktur Pengendalian Intern

Pemahaman dan evaluasi atas struktur pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan oleh akuntan publik. Karena baik buruknya struktur pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hal-hal berikut ini:

- a. Keamanan harta perusahaan
- b. Dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan perusahaan
- c. Lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan
- d. Tinggi rendahnya audit fee
- e. Jenis opini yang akan diberikan akuntan publik

Menurut Agoes (2012:104) dalam melakukan pemahaman dan evaluasi pengendalian intern dapat dengan beberapa cara yaitu:

- a. Internal Control Questionnaires
Cara ini banyak digunakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Biasanya KAP sudah memiliki satu set ICQ yang standar, yang biasanya digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian intern di berbagai jenis perusahaan
- b. Flow Chart
Flow chart menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha. Auditor yang terlatih baik, penggunaan flow chart lebih disukai karena auditor bisa lebih cepat melihat apa saja kelemahan dan kebaikan dari suatu sistem dan prosedur.
- c. Narrative
Dalam hal ini auditor menceritakan dalam bentuk memo, sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan. Cara ini biasa digunakan untuk klien kecil yang pembukuannya sederhana.

2.7 Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana, dan pengendalian intern dapat tidak efektif karena adanya kolusi diantara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2006:319.6):

Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya, pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang

sifatnya sederhana. Disamping itu, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern.

Menurut Mulyadi (2009:181) ada lima keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern, yaitu:

1. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali, manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.
2. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.
3. Kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (*collusion*). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.
4. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.
5. Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dibawah ini adalah ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi pedoman bagi penulis dalam penelitian yang dilakukan di PT Cahaya Putri Selatan Palembang.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Harry Kachfi (2009)	Analisis Pelaksanaan Internal Audit Pada PT Indosat (Persero), Tbk Jakarta	Metode Champion	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan kedudukan internal audit sudah memadai dengan diperkuat oleh adanya SK Direksi PT Indosat yang menyatakan bahwa divisi internal audit bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Sedangkan untuk komponen internal audit juga sangat memadai hal ini dilihat dari dilaksanakannya kebijakan perusahaan oleh orang-orang yang berkompeten, dan adanya penaksiran risiko.
2.	Shilvia Mediantai Octavia (2012)	Analisis Penerapan Pengendalian Intern Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II Palembang	Statistik Deskriptif dan Mean	Lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan berada pada interval lebih dari 2,50 dan valid. Hasil penelitian sudah baik pada setiap unsur pengendalian intern karena unsur-unsur tersebut sudah diterapkan di perusahaan.
3.	Dian Ayu Prasanti	Analisis Pengendalian	Statistik Deskriptif	Unsur pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian,

	(2013)	Intern Pada PT Wuerth Indah Cabang Palembang	Frekuensi	penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, serta informasi dan komunikasi, pada umumnya telah cukup memadai. Namun, untuk penerapan unsur pemantauan dinilai kurang memadai. Hal tersebut dapat dilihat karena PT Wuerth Indah Cabang Palembang belum menggunakan tenaga auditor dalam melakukan pemeriksaan intern dan pimpinan juga tidak ikut berperan dalam pengawasan atas aktivitas operasi perusahaan.
--	--------	--	-----------	---

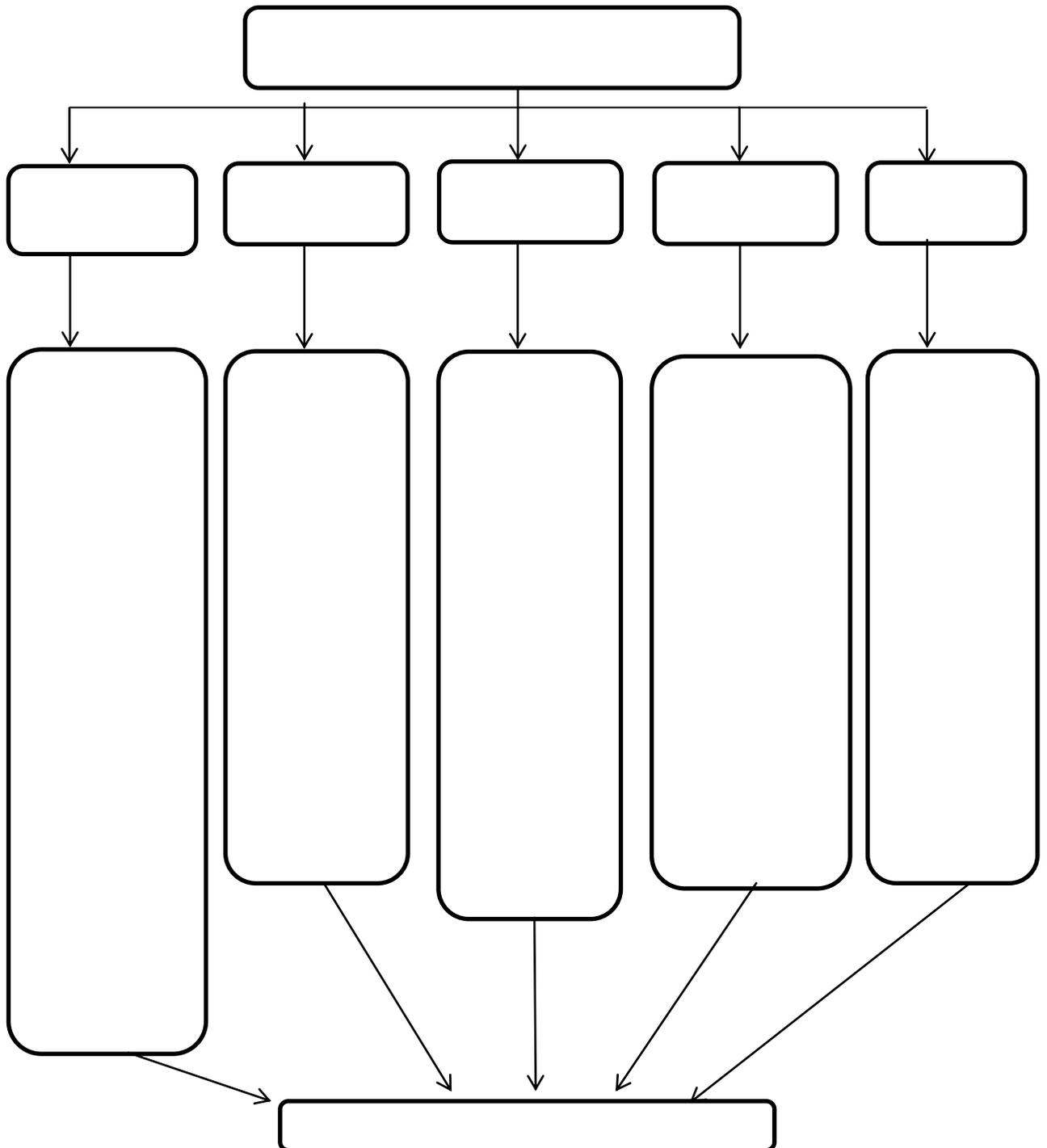
2.9 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:89) bahwa:

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.

Penulis menguraikan bagaimana penerapan unsur-unsur struktur pengendalian intern pada PT Cahaya Putri Selatan Palembang. Unsur-unsur tersebut adalah lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Selanjutnya, diteliti bagaimana penerapannya dalam perusahaan, sehingga hasil penelitian tersebut didapat apakah penerapan/pelaksanaan ke-5 (kelima) unsur tersebut termasuk dalam kategori interval kesimpulan telah sangat memadai (diterapkan dengan sangat baik), cukup memadai (diterapkan dengan cukup baik), kurang memadai (diterapkan dengan buruk), atau sangat kurang memadai (diterapkan dengan sangat buruk).

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian ini yang didasarkan pada teori yang telah dikemukakan sebelumnya:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran